
**STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2017-2022**

***TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN THE MENTAWAI ISLANDS
REGENCY GOVERNMENT FOR THE 2017-2022 PERIOD***

Afifah Nurul Fadhilah¹, Tamrin², Andri Rusta³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

afiahnurulfadhilah22@gmail.com, tamrinkiram@gmail.com, arusta@soc.unand.ac.id

ABSTRAK :Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata. Salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh kabupaten Mentawai adalah wisata bahari seperti surfing dan wisata budaya. Untuk meningkatkan potensi tersebut diperlukan sebuah strategi dari pemerintah agar pembangunan pariwisata di Mentawai dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain strategi, sumber daya manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan karena dapat mempengaruhi pembangunan pariwisata di Kepulauan Mentawai. oleh karena itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis Strategi Pembangunan Kepariwisata di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pengembangan Pariwisata Djoko Wijono Konsep 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintahan Kepulauan Mentawai sudah merancang strategi untuk pembangunan pariwisata di Kepulauan Mentawai tetapi strategi tersebut belum berjalan dengan lancar dan untuk sumber daya manusianya sudah ada pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Mentawai.

Kata kunci : Strategi pembangunan, Kepariwisataan, Kebijakan, Kepulauan Mentawai

ABSTRACT : *Mentawai Islands Regency has the potential to increase development in the tourism sector. One of the tourism potentials owned by the Mentawai district is marine tourism such as surfing and cultural tourism. To increase this potential, a strategy from the government is needed so that tourism development in Mentawai can increase local revenue (PAD). In addition to strategy, human resources (HR) also need to be improved because it can affect tourism development in the Mentawai Islands. therefore, the aim of this research is to explain and analyze the Tourism Development Strategy in the Government of the Mentawai Islands Regency for the 2017-2022 period. This study uses a qualitative research approach with the case study method, as well as data collection techniques in the form of secondary data, interviews and documentation. To analyze the data obtained, researchers used the theory put forward by Tourism Development Djoko Wijono The concept of 4 pillars of tourism development. The results of this study are that the government of the Mentawai Islands has designed a strategy for tourism development in the Mentawai Islands but the strategy has not been running smoothly and for human resources there has been training conducted by the government of the Mentawai Islands.*

Keywords: *Development strategy, Tourism, Policy, Mentawai Islands*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan.

Desentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama dibidang perekonomian daerah itu sendiri. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang Negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat6 "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini

Strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) , lahir sekitar tahun 1970 seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup, mendorong beberapa negara untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang kerusakan lingkungan yang terjadi.

Ada lima komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan berkelanjutan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. Salah satu bidang pembangunan ekonomi dimaksud adalah bidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative.

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak.

Ada lima komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan berkelanjutan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. Salah satu bidang pembangunan

ekonomi dimaksud adalah bidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative.

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ekowisata menurut *International Ecotourism Society* adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dikenal baik oleh masyarakat mancanegara maupun masyarakat daerah sendiri, ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumber pendapatan daerah apabila keberadaannya dikelola dengan baik, paling tidak untuk menarik minat wisatawan domestik.

Untuk mengembangkan obyek wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya tidak mudah karena sarana, prasarana pendukung dan sumber daya manusia pada umumnya masih adanya hambatan sangat minim, jumlah armada transportasi laut dan udara dari Padang ke wilayah Mentawai sangat terbatas, Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara optimal, telekomunikasi sangat terbatas, tidak adanya *armada rescue* serta lemahnya kepemilikan properti, hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan dan pengelolaan secara optimal terhadap objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dari itu peran serta dari pihak swasta juga sangat diperlukan untuk membantu kemajuan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kualitas SDM juga mempengaruhi majunya sektor pariwisata yang ada di mentawai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sebagai wujud manifestasi visi dan misi kepala daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022

merupakan arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022, Bapak Yudas Sabaggalet, S.E., M.M dan Kortanius Sabeleake, S.Pt yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Ada beberapa permasalahan yang muncul sebagai suatu kawasan pariwisata sehingga mendorong pemerintah daerah membutuhkan suatu strategi pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berkaitan dengan pengembangan akan mengacu pula pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber dana dengan demikian sangat dibutuhkannya juga suatu strategi pemasaran demi meningkatkan permintaan pariwisata budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pulau Mentawai terdapat 4 pulau utama yaitu Pulau Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan dan Siberut yang menjadi tujuan wisatawan dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil tercatat ada 213 pulau, wilayah daratan kepulauan sebagian besar masih berupa hutan rimba alami karena memiliki sejarah geologis yang cukup lama sejak zaman dahulu, maka hutan di pulau ini masih memiliki binatang khas dan dilindungi tercatat ada 20 lebih jenis binatang yang hidup di pulau ini. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, hanya memprioritaskan 4 sektor pembangunan ekonomi Sumatera Barat periode 2016-2020, yakni pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan pariwisata. Prioritas pembangunan ekonomi periode ini sama dengan periode 2010-2015 karena 4 sektor tersebut yang mendominasi kegiatan ekonomi di Sumatera Barat selama ini.

Pada periode ini, pembangunan 4 (empat) sektor tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan. Bedanya, sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari 3 sektor lainnya. Kepala Bappeda Sumatera Barat, menyatakan, sektor pariwisata, berkontribusi lebih banyak untukgerakkan ekonomi karena pariwisata banyak keterkaitannya, seperti mendorong peningkatan industri-industri cenderamata, makanan, transportasi, komunikasi, penginapan, dan sebagainya. Untuk pengembangan pariwisata tentu akan memerlukan pembangunan infrastruktur agar wisatawan lebih banyak yang datang ke daerah destinasi wisata. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun eco tourism. Berbagai even internasional yang pernah digelar adalah International Peace Walk dan Women Walk yang melibatkan lebih dari 400 orang wisatawan mancanegara dan klub jalan kaki dunia dari sekitar 22 negara, dan lomba Surfing International yang akan diselenggarakan di Mentawai tepatnya di Pulau Siberut Mentawai.

Sayangnya, keindahan alam kawasan yang merupakan perpaduan, lembah, danau dan pantai dengan budaya yang unik ini belum dikelola secara baik sehingga industri pariwisata nyaris tidak berkembang. Padahal, dengan sentuhan infrastruktur pariwisata dan promosi yang memadai diperkirakan daerah ini tidak akan kalah dengan Bali. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi juga menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Alat komunikasi sudah merupakan bagian inti (*inherent*) dalam produk pariwisata, sehingga keterbatasan alat komunikasi jelas menghambat proses pengembangan pariwisata di Mentawai. Rendahnya kepedulian pemerintah daerah, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia juga menjadi masalah yang ada di Pemerintahan Mentawai. Mengingat Pariwisata di Mentawai terpusat pada daerah laut dan hutan alam, maka para wisatawan menghadapi banyak tantangan alam.

Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengupayakan potensi wisata bahari yang sangat besar, dalam hal ini belum adanya sebuah regulasi. Selain sebagai jaminan juga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengeluarkan berbagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah sektor kepariwisataan khususnya terhadap pengembangan dan pengelolaan zona wisata bahari. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 terdapat sebanyak 194 objek wisata yang berada di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain; 22 objek wisata panorama alam, 150 objek wisata bahari, 9 objek wisata sumber air, dan 13 objek wisata budaya.

Jenis objek wisata bahari umumnya lebih mendominasi, oleh karena itu salah satu subsektor pariwisata yang mendapatkan perhatian serius dan pengelolaan yang baik adalah wisata bahari, yang sangat berpotensi serius untuk dikembangkan demi kemajuan daerah Mentawai. Selama ini, wisata di segmen inilah yang paling diminati wisatawan mancanegara. Kegiatan yang sangat bisa dilakukan antara lain wisata pantai, selancar (*surfing dan boating*), menyelam (*diving/ snorkling*) berlayar (*sailing*), pesiar (*cruising*), berenang (*swimming*), dan memancing (*fishing*).

Selama ini banyak turis yang datang untuk menikmati berbagai atraksi di wilayah pantai

yang sangat terkesan akan keasrian hutan kepulauan Sikakap. Kepulauan Sikakap ini memiliki garis pantai sepanjang 412 km. Potensi kepulauan Sikakap adalah ombaknya yang berulang-ulang dan sangat sesuai untuk dijadikan tempat selancar air (surfing). Dengan adanya pembangunan pariwisata tentu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kepulauan Mentawai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus intrinsi.

B. PEMBAHASAN

Dasar penggunaan definisi pariwisata di Indonesia adalah UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah (UU No. 10 Tahun 2009). Kabupaten kepulauan Mentawai memiliki daya tarik wisata kelas dunia dan sektor pariwisata dijadikan sektor utama yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai karena diyakini sektor pariwisata memberikan *effect* terhadap sektor lainnya seperti, perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu, diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan pengentasan kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sebagai wujud manifestasi visi dan misi kepala daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 merupakan arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022, Bapak Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memiliki rencana dan strategi dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan tersebut sudah dapat dilihat dengan adanya infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia melalui beasiswa pendidikan dari pemerintah dan sudah ada dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian beasiswa tugas belajar non PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sudah ada pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Mentawai seperti sudah adanya pelatihan untuk menciptakan karya seni (pembuatan Assesoris Mentawai) dan usaha (kerupuk ubi) yang bisa diperjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Mentawai. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Di dalam pembangunan industri pariwisata dibutuhkan suatu struktur yang akan bertanggung jawab atas suatu pembangunan. Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh dan kondusif, maka diperlukan bentuk kolaborasi dan kerja sama antar pelaku industri agar kualitas industri pariwisata bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Dalam pembangunan pariwisata di

Kepulauan Mentawai akan berkembang jika seluruh aspek berkolaborasi untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kepulauan Mentawai.

Di pemerintahan Kepulauan Mentawai sudah ada kolaborasi dan keterlibatan seluruh aspek tidak hanya Dinas Pariwisata tetapi juga melibatkan aspek lain seperti Dinas Lingkungan dan juga Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (BAPPEDA). Dengan adanya keterlibatan seluruh aspek kepentingan diharapkan agar pembangunan pariwisata di Kepulauan Mentawai menjadi maju dan berkembang.

Kelembagaan kepariwisataan merupakan suatu integrasi antara pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata peraturan dan teknis pelaksanaan, yang berlangsung secara terus-menerus serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Di pemerintahan Mentawai sendiri sudah ada kelembagaannya, semua ikut berkolaborasi dalam pembangunan pariwisata Mentawai agar maju dan berkembang. Dan di dalam perkembangan pariwisata di Mentawai juga sudah ada regulasi yang di buat oleh pemerintah daerah seperti perda retribusi dan hiburan, terdapat didalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pertunjukan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki empat pulau, dimana setiap pulau memiliki destinasi wisata yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan letak kawasan tiap-tiap pulau seperti, di pulau Siberut terdapat tempat wisata budaya, hutan mangrov dan surfig, di Pagai Utara terdapat tempat surfing, di Pulau Sipora ada surfing dan di Sipora Selatan ada surfing. Untuk lima tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017-2019 bahkan sampai sekarang daya tarik prioritas dan pembangunan prioritas yang dikembangkan oleh pariwisata adalah kawasan 3M 1K (Muntei, Madobag, Mappadegat dan Katiet) dan sudah masuk dalam rencana induk pengembangan pariwisata dan sudah masuk dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Daerah Tujuan Desa Wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katie. Di tempat daerah prioritas juga sudah dilengkapi dengan fasilitas dan dananya adayang berasal dari DAK dan APBN.

Fasilitas pendukung yang ada di pariwisata kepulauan Mentawai sudah ada dan sudah bisa dipakai untuk para wisatawan yang berkunjung ke pariwisata Mentawai. Selain fasilitas pendukung, fasilitas penunjang juga sudah ada seperti hotel atau penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Mentawai. Untuk akses jalan sekarang sudah ada agar mempermudah para wisatawan untuk menuju tempata wisata. Fasilitas tersebut juga sudah dibangun sejak tahun 2017 sampai sekarang dan dananya berasal dari berbagai sumber seperti dari DAK, DAU dan APBN, walaupun belum lengkap semuanya tetapi saat ini pemerintah berusaha untuk melengkapi fasilitas penunjang yang ada di tempat wisata, hanyasaja dana yang kurang mencukupi. Salahsatu cara untuk menarik pengunjung adalah dengan cara melengkapi fasilitas yang ada di tempat wisata agar para pengunjung tertarik untuk berwisata. Selain itu dibutuhkan strategi agar fasilitas penunjang pariwisata berkembang pesat, salah satu strategi menggelar even-event agar para wisatawan berkunjung, dengan adanya pengunjung tentu membuat fasilitas seperti resort dan restourant akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Selain dana yang bersumber dari pemerintah, tentu diperlukan pihak lain untuk pengembangan pariwisata yang ada di Mentawai, untuk itu diperlukan investor agar membantu dari segi modal. Dengan memiliki dana tambahan dari para investor, pemerintah Mentawai akan memiliki keluasan untuk mengembangkan pariwisata di Mentawai. Saat ini pemerintah Mentawai baru mendapatkan investor dari lokal, adapun dari pihak luar harus melakukan perjanjian dengan pemerintah Mentawai. Pola pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimulai dari pelosok desa yang menjadi kawasan desa wisata. Jika masyarakat desa sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada maka pemerintah akan maju dan berkembang. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pengawasan di setiap kawasan desa wisata, agar sesuai dengan rencana dan tujuan pemerintah Mentawai.

Dalam mempromosikan suatu objek wisata tidak hanya keindahan tetapi keunikan juga

harus ada didalam pola promosi, dan yang paling penting adalah *teling story*, yang menyangkut didalamnya yaitu, dari awal kronologis keberangkatan para wisatawan samapai dengan apa yang didapat oleh wisatawan setelah berkunjung ke tempat wisata. Untuk promosi, sekarang dunia digital sudah canggih, dengan adanya internet seluruh masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan mencari informasi secara cepat dengan internet. maka kita harus memanfaatkan media sosial yang ada agar membantu kita dalam mempromosikan suatu objek. sportasi yang digunakan oleh para wisatawan menuju tempat wisata.

Transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk menuju objek wisata, adanya transportasi bisa mempermudah para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. Di Mentawai sudah ada beberapa transportasi yang dapat digunakan oleh para wisatawan untuk mencapai ojekt wisata.

Untuk pergi ke Mentawai sendiri sudah ada kapal Mentawai Fast yang memiliki jarak tempuh kurang lebih tiga setengah jam untuk sampai ke Mentawai, setelah sampai di dermaga Mentawai (Tuapejat) sudah ada *egen travel* yang akan membawa para wisatawan ke tempat objek wisata. Selain kapal, sekarang sudah ada pesawat yang beroperasi tetapi belum diresmikan oleh presiden. Dengan adanya pesawat di Mentawai akan mempermudah para wisatawan yang berkunjung ke Mentawai .

Pengembangan daerah tujuan desa wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan untuk menggali potensi sumber daya alam dan perairan (darat dan laut) serta budaya, sebagai wahana pengembangan desa wisata dengan mengupayakan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan lingkungannya. Rencana aksi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan konsep desa wisata yang menyediakan objek wisata alternative serta guna mengenalkan jenis wisatadan gaya hidup penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat sertabetanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya serta menggali potensi desa untu pembangunan masyarakat sekitar desawisata.
3. Mendorong sikap kewirausahaan masyarakat setempat sehingga memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
4. Memberikan arahan strategi berdasarkan potensi yang ada di tempat wisata.
5. Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya, lingkungan alam termasuk flora dan fauna dalam rangka perwujudan jati diri bumi sikerei.

C. PENUTUP

Strategi pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Mentawai maka disimpulkan:

1. Pembangunan industri pariwisata. Struktur pembangunan industri pariwisata melibatkan seluruh pihak usaha yang akan berkolaborasi untuk pembangunan industri pariwisata agar berkembang dan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan.
2. Pembangunan destinasi pariwisata. Untuk lima tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017-2019 bahkan sampai sekarang daya tarik prioritas dan pembangunan prioritas yang dikembangkan oleh pariwisata ada di kawasan 3M 1K (Muntei, Madobag, Mappadegat dan Katiet) dan sudah masuk dalam rencana induk pengembangan pariwisata. Di tempat daerah prioritas juga sudah dilengkapi dengan fasilitas dan dananya ada yang berasal dari DAK dan APBN.

3. Pembangunan pemasaran pariwisata. Kepala bidang pemasaran pariwisata kabupaten Mentawai melakukan promosi melalui media cetak dan media sosial seperti membuat website pariwisata Mentawai. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses promosi pemerintah memanfaatkan media sosial.
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Di pemerintahan Mentawai sendiri sudah ada kelembagaannya, semua ikut berkolaborasi dalam pembangunan pariwisata Mentawai agar maju dan berkembang. Dan di dalam perkembangan pariwisata di Mentawai juga sudah ada regulasi yang di buat oleh pemerintah daerah seperti perda retribusi dan hiburan.
5. Atraksi. Daya tarik wisata yang layak dijual ke pasar wisata kepada wisatawan. Di Mentawai objek wisata yang layak untuk diperjual belikan adalah surfing . Hal tersebut terbukti karena banyak pengunjung yang datang ke Mentawai.
6. Amenitas. Pemerintah Mentawai sudah menyediakan fasilitas untuk parawisatawan yang berkunjung ke tempat wisata seperti sudah ada resort, dan rumah makan. Pemerintah juga sudah ada strategi seperti mengadakan event-event dan pengawasan.
7. Aksesibilitas. Di Mentawai sudah ada beberapa transportasi yang dapat digunakan oleh parawisatawan untuk mencapai objek wisata.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Akib Haedar dkk. 2015. Pembangunan Ekonomi dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5 No. 1 Thn. 2015.
- Alam, Ilma Nur. 2020. Strategi Pemasaran Pariwisata Ke Asia Tenggara Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Tahun 2018-2020. UIN Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi*.
- Ariono dkk. 2018. Identifikasi dan Potensi Pengembangan Desa Wisata Menuju Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2018, 9 Agustus 2018*. Fakultas Teknologi Informasi-UNMER. Malang.
- Dewi, Murti Sari. 2022. Perancangan Sistem Informasi dan Pemasaran Pariwisata Sebagai Media Promosi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Berbasis Web. IAIN Batusangkar. *Skripsi*.
- Dewi Rhisna Dyah Aliska. 2017. Pengembangan Pariwisata Melalui Pelestarian Kesenian Reyog Ponorogo dalam Mewujudkan City Branding. Universitas Brawijaya. *Skripsi*.
- Handoyono Eko dkk. 2017. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. Volume 2 No. 2 April. 2017.
- Kawakibi I Wayan Thariqy. 2017. Motivasi dan Persepsi Wisatawan Terhadap Potensi Wisata di Kepulauan Mentawai. *Jurnal Kepariwisataandan Hospitalitas*. Vol. 1, No. 2, November 2017.
- Kholik Saeful. 2020. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 6 No. 1-Juni 2020.
- Muhammad Hasan, M. A. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina, 2018.
- Napitupulu Novena Ulita. Strategi Pemasaran Pariwisata Budaya Mentawai Melalui Produk Kesenian Mutoruk. Universitas Mercu Buana Jakarta. *Jurnal Desain & Seni, FDSK-UMB*. Hlm.59–66.

- Patria Teguh Amor. 2014. Tinjauan Sistem dan Elemen Pariwisata di Kabupaten Bandung, Bali, Melalui Sistem Pariwisata Laiper. *Jurnal BINUS University*. Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 66-79.
- Priwijaya Vikri. 2021. Strategi Pembangunan Pariwisata Pasca Gempa di Kecamatan Kabupaten Lombok Timur (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur). Universitas Muhammadiyah Malang. *Skripsi*.
- Putri Rezi Kurnia. 2015. Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Universitas Andalas. *Skripsi*.
- Rares dkk. 2019. Pembangunan Pariwisata di Pulau Nau Kabupaten Waropen Provinsi Papua. *Skripsi*.
- Rudi Santoso dkk. 2021. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Jember". *Majalah Ekonomi*. Vol. 26 No.2. Hlm. 99-100.
- Rohman, M. Fathur. 2020. Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Desa Wisata Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam Tinjauan Teori Solidaritas Emile Durkheim. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi*.
- Setiawan Ida Bagus. 2015. Identifikasi Potensi Wisata Beserta 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancillary) di Dusun Sumber Wangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali. Universitas Udayana. *Skripsi*.
- Rudi Santoso dkk. 2021. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Jember". *Majalah Ekonomi*. Vol. 26 No.2. Hlm. 99-100.
- S Laurensius Arliman. 2018. Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2. Pp. 273-294.
- Sri Mariati. 2022. Analisis Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Rudi Santoso dkk. 2021. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Jember". *Majalah Ekonomi*. Vol. 26 No.2. Hlm. 99-100.
- S Laurensius Arliman. 2018. Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2. Pp. 273-294.
- Sri Mariati. 2022. Analisis Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol. 27 No, 2 Juli 2022, pp 128-144.
- Zulhitra, deki. 2016. Strategi Pengembangan Desa Madobag sebagai Desa Wisata Budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Skripsi*